



## Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Kantor Walikota Pematang Siantar

**Harudini Nizar Situmorang**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [nizarharudini@gmail.com](mailto:nizarharudini@gmail.com)

**Arnida Wahyuni Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [arnidawahyuni@yahoo.com](mailto:arnidawahyuni@yahoo.com)

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

**Abstract.** *The aim of this research is to study and understand how the Accounting Information System (AIS) is implemented at the Pematang Siantar City Hall. This research is included in the type of descriptive research using a qualitative approach. Researchers obtained research results, namely that the application of the accounting information system in the Pematang Siantar City Hall environment, including the use of the Regional Financial Management Information System (SIMDA), has been implemented but there are still several obstacles or constraints in the implementation process. The obstacles that researchers found were Human Resources (HR) which were still considered less reliable in operating the SIMDA Finance application, not yet integrated into all online Village Work Units (SKPD) and the absence of an Order (SK) from the Mayor of Pematang Siantar regarding the formation of a SIMDA financial management group. . From the research results, it can be concluded that the implementation of SIA in the form of a regional financial management information system (FIMS) is already underway, but there are several obstacles or limitations that need to be overcome so that it can be realized or implemented. Implementation of Financial SIMDA can run optimally and according to plan. Factors that support the implementation of SIMDA are communication, attitudes/predispositions, and bureaucratic structure. The slowing factor is human resources. The quality of information produced by SIMDA sponsors is understandable, relevant, reliable and comparable.*

**Keywords:** *System, Information System, Accounting Information System, Regional Management Information System, Policy Implementation Theory*

**Abstrak.** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Balai Kota Pematang Siantar. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh hasil penelitian yaitu penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan Balai Kota Pematang Siantar termasuk penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) sudah diterapkan namun masih ada beberapa kendala atau kendala dalam proses implementasinya. Kendala yang peneliti temukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbilang kurang handal dalam pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan, belum terintegrasinya ke seluruh Satuan Kerja Desa (SKPD) online dan belum adanya Surat Perintah (SK) Walikota Pematang Siantar tentang pembentukan kelompok pengelola keuangan SIMDA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi SIA berupa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (FIMS) sudah berjalan, namun terdapat beberapa kendala atau keterbatasan yang perlu diatasi agar dapat terwujud atau terlaksana. Pelaksanaan SIMDA Keuangan dapat berjalan optimal dan sesuai rencana. Faktor yang mendukung pelaksanaan SIMDA adalah komunikasi, sikap/predisposisi, dan struktur birokrasi. Faktor perlambatannya adalah sumber daya manusia. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sponsor SIMDA dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.*

**Kata kunci:** *Sistem, Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Teori Implementasi Kebijakan*

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 06, 2023

\*Harudini Nizar Situmorang, [nizarharudini@gmail.com](mailto:nizarharudini@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi diperlukan bagi seluruh dunia usaha dan lembaga negara. Salah satu faktor yang menunjang kualitas pelaporan keuangan perusahaan dan instansi pemerintah adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan disusun menurut suatu proses berdasarkan masukan-masukan yang baik, proses yang baik dan hasil yang baik. Ketiga aspek tersebut harus berkelanjutan sebagai landasan untuk menciptakan sistem informasi keuangan yang baik.

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab menyiapkan informasi keuangan untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Setiap departemen dalam suatu organisasi memerlukan informasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan, tanggung jawab, dan wewenangnya. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 391 tentang Pemerintahan Daerah harus menyajikan informasi tentang pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pelaporan keuangan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Saat ini Departemen Kantor Walikota Pematang Siantar telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berupa Sistem Informasi Manajemen Sektor Keuangan (SIMDA) pada tahun 2015. SIMDA merupakan program aplikasi TI yang terintegrasi dan dapat mendukung proses pengelolaan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah di tingkat kabupaten/kota, hingga kelurahan. Aplikasi keuangan SIMDA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) juga banyak digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah guna memudahkan pengelolaan keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Aplikasi SIMDA Keuangan digunakan oleh Kantor Walikota Pematang Siantar sebagai sistem informasi pelaporan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi agar SIMDA keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai peruntukannya. Kendala atau hambatannya adalah sumber daya manusia yang masih terbilang kompeten dalam menggunakan aplikasi, belum terintegrasi di seluruh SKPD online, dan belum adanya surat keputusan Walikota Pematang Siantar tentang struktur tim SIMDA pengelolaan keuangan Kantor Walikota Pematang Siantar. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar pelaksanaan SIMDA keuangan dapat terlaksana secara maksimal dan kualitas penerapan SIMDA keuangan terhadap informasi keuangan dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi Hertanto dkk, khususnya SIMDA Finance menunjukkan bahwa SIMDA Finance sebagai sistem informasi manajemen mendukung tiga hal utama, yaitu dalam proses perencanaan, pengendalian pengendalian dan pengambilan keputusan. Secara kolektif, SIMDA Finance berkontribusi terhadap ketiga proses tersebut, yang kemudian berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap proses pengelolaan keuangan, khususnya proses pelaporan keuangan. Hal ini dapat dikaitkan dengan pandangan Ulum (2012) yang menyatakan bahwa efisiensi merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan organisasi tersebut efektif. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah efektivitas bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Efektivitas hanya mempertimbangkan seberapa baik program dan kegiatan mencapai tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada Kantor Walikota Pematang Siantar.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi sering digunakan untuk merujuk pada interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi.

Menuruturut Leitch dan Davis dari Minarni, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari, mendukung operasi, membentuk manajemen dan kegiatan strategis suatu organisasi dan menyediakan laporan- laporan yang diperlukan kepada pihak eksternal tertentu.

## **2. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Menurut Ardana dan Hendro Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **3. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

SIMDA merupakan upaya pemenuhan kebutuhan informasi secara tepat waktu, akurat, komprehensif, tepat dan terpadu, untuk mendukung proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi dan dialog masyarakat dalam pengembangan kebijakan.

Komponen komponen SIMDA sistem informasi manajemen daerah meliputi empat lapisan struktural (BPKP 2008), yaitu:

1. Akses terhadap jaringan telekomunikasi, internet dan media lain yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses titik-titik layanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik adalah laman informasi elektronik Pemerintah di Internet bagi penyelenggara pelayanan publik terpilih, yang mengintegrasikan pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik sejumlah instansi terkait.
3. Menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan informasi transaksi dan dokumen elektronik
4. Aplikasi dan Infrastruktur Inti, yaitu infrastruktur baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pemrosesan, transaksi, dan distribusi informasi.

#### **4. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, tata letak dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dari Citta Nadya, ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan: Pertama, standar dan tujuan politik. Kedua, sumber daya. Ketiga, hubungan antar organisasi. Keempat, karakteristik agen pelaksana, meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Kelima, kondisi ekonomi – politik – sosial, termasuk sumber daya ekonomi dan lingkungan implementasi kebijakan. Keenam, watak pelaku.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menafsirkan data berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam tulisan atau gambar, bukan dalam angka-angka sesuai temuan peneliti. Menurut Bogan dan Tylor dalam bukunya Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah hasil sumber tekstual yang menghasilkan data deskriptif dan dapat dianggap oleh peneliti sebagai suatu masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa wawancara dengan salah satu informan kunci yaitu Bapak Fajar dan Bapak Herman dari Kantor Walikota Pematang Siantar serta dokumen/catatan SKPD sebagai gambaran umum, struktur organisasi dan uraian tugas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara tatap muka dengan informan kunci yaitu Kepala bagian administrasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan catatan.

Langkah-langkah analisis data akan dikembangkan pada :

- a. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen konsisten dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian
- b. Data terorganisir diidentifikasi berdasarkan topik, Menemukan hubungan antar topik
- c. Menafsirkan hasil dalam kaitannya dengan hubungan antar topik menggunakan beberapa teori terkait
- d. Interpretasi yang dihasilkan dikembangkan menggunakan analisis deskriptif kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diajukan peneliti, menjawab permasalahan yang ada yaitu “Penerapan sistem informasi akuntan di lingkungan Balai Kota Pematang Siantar”. Analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: HR masih terbilang bisa dipercaya saat menggunakan aplikasi ini.

Implementasi SIMDA keuangan di lingkungan Kantor Walikota Pematang Siantar secara umum tidak lepas dari faktor pendukung, ada beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA keuangan. Masih terdapat sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidangnya, seperti pegawai bergelar sarjana hukum, pendidikan bahkan teknik yang bertanggung jawab dalam penggunaan aplikasi keuangan SIMDA. Hal inilah yang membuat sumber daya manusia tertentu semakin tidak bisa dipercaya dalam menggunakan aplikasi.

Penyelenggaraan SIMDA keuangan di lingkungan umum Pemerintah Kota Pematang Siantar harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal, menurut Edward III, dengan komponen sumber daya antara lain jumlah pegawai, keahlian petugas pelaksana manajemen, informasi yang tepat dan lengkap untuk melaksanakan kebijakan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dapat dicapai melalui kegiatan berorientasi teknis (BimTek) secara rutin dan berkala serta didukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas

(skill) sumber daya manusia melalui bimbingan teknis secara berkala agar pelaksanaan SIMDA keuangan dapat berjalan maksimal sesuai rencana.

Dalam proses implementasinya juga terdapat faktor yang secara mendasar menghambat terlaksananya SIMDA Keuangan dengan baik, yaitu belum terintegrasinya ke seluruh SKPD secara online, sehingga penyampaian data keuangan selalu dilakukan secara manual.

Penerapan SIMDA keuangan Bersama Kantor Wali Kota Pematang Siantar harus terintegrasi dengan seluruh SKPD online untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transfer data keuangan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ardana dan Hendro yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat dan mengolah data keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan, perlu dilakukan integrasi dengan seluruh SKPD online agar laporan yang dihasilkan lebih bernilai dan berkualitas. Belum ada Keputusan Walikota Pematang Siantar tentang struktur kelompok pengelola keuangan SIMDA di Kantor Walikota Pematang Siantar.

Faktor terakhir yang dianggap tidak penting adalah struktur tim pengelola keuangan SIMDA. Penyelenggaraan keuangan SIMDA dilihat dari struktur kepengurusan belum terlaksana secara tertib karena belum adanya surat keputusan (SK) tim pengelola SIMDA di lingkungan umum Kantor Wali Kota Pematang Siantar. Hal ini tidak sejalan dengan keinginan Kelompok Kerja Pengembangan Keuangan SIMDA (BPKP) dalam hal sumber daya manusia untuk melaksanakan keuangan SIMDA.

Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Keuangan SIMDA sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan ketentuan Satgas SIMDA Pembangunan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, Bagian Umum Kantor Walikota Pematang Siantar perlu menetapkan secara jelas dan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Pengelola Keuangan SIMDA dengan struktur Satgas Pengembangan Keuangan SIMDA BPKP yang meliputi: manajer, wakil direktur, pengontrol teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim; administrator database, asisten administrator dan timnya serta seluruh operator SKPD.

## **Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan SIMDA Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa BKAD Kota Pematang Siantar melihat adanya kendala atau faktor yang menghambat pelaksanaan SIMDA keuangan di BKAD Kota Pematang Siantar merupakan tempat sumber daya manusia berada. Dari segi kualitas kita memahami tujuan pelaksanaan SIMDA keuangan, namun dari segi kuantitas masih terdapat sumber daya manusia yang belum memahami secara jelas pelaksanaan SIMDA keuangan sehingga selalu terjadi ketergantungan pada sebagian masyarakat yang memahami dengan baik SIMDA keuangan. utama. Oleh karena itu, hal ini tidak sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan SIMDA keuangan adalah sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Hasil wawancara dengan beberapa karyawan menunjukkan bahwa sebelum penerapan SIMDA Finance, manajer langsung berdiskusi dengan bawahan atau koleganya bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk penerapan baru, akan disosialisasikan untuk pertama kalinya. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Berdasarkan analisis di atas ditemukan bahwa implementasi SIMDA keuangan yang optimal di BKAD Kota Pematang Siantar didukung oleh komunikasi atau sosialisasi yang positif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.

### **2. Disposisi atau sikap**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Terkait pandangan atau sikap tersebut, kami melihat adanya feedback yang baik dari para pelaksana karena mereka sadar bahwa pelaksanaan SIMDA keuangan akan memberikan dampak yang baik sehingga mereka menyetujui pelaksanaan SIMDA keuangan.

### **3. Struktur Birokrasi**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisasi dalam implementasi kebijakannya adalah derajat pengawasan hierarkis terhadap keputusan

dan proses unit dalam lembaga pelaksana (Edward III:1980). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya terhadap pengawasan pelaksanaan SIMDA keuangan terlihat dari penyajian laporan keuangan tidak pernah terhalang oleh SIMDA keuangan. Dengan pengawasan dan perhatian yang baik dari administrator SIMDA, kegagalan yang terjadi pada sistem dapat diantisipasi, misalnya dengan menyediakan server cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi, khususnya dalam hal pengawasan, juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan SIMDA keuangan.

#### Kualitas Informasi SIMDA Keuangan

1. Mudah Dipahami Kualitas informasi yang diberikan SIMDA Finance mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, wakil rakyat, pihak pemberi atau yang berperan dalam pemberian, investasi dan proses pemberian pinjaman serta pemerintah. Hal ini terlihat jelas dalam proses penyusunan RKA yang harus mendapat persetujuan wakil rakyat. Setelah disetujui, DPA disusun dan Peraturan Bupati diterbitkan dan dapat dilihat oleh semua sektor pemerintahan dan masyarakat.
2. Relevan Suatu laporan keuangan dapat dianggap relevan apabila informasi yang dikandungnya memberikan manfaat yang relevan terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Agar berguna, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti hasil wawancara dengan KSB. Dalam akuntansi, setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing dan diprogram langsung ke dalam sistem.
3. Dapat Diandalkan Laporan keuangan yang disusun oleh SIMDA Finance dapat dikatakan dapat diandalkan, hal ini terlihat pada: a. Kewajaran setiap transaksi dikuatkan dengan laporan pertanggungjawaban. b. Kami dapat memverifikasi secara khusus bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh SIMDA Finance telah diperiksa oleh BPK dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pendapatan dan belanja.
4. Laporan keuangan komparatif yang disusun oleh SIMDA Finance dapat dibandingkan antara periode sebelumnya dan antar instansi untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil usaha, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara matematis.

Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun SIMDA Finance memenuhi karakteristik pembandingan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan umum Kantor Walikota Pematang Siantar dengan menggunakan aplikasi keuangan SIMDA. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang belum dapat diatasi seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA, belum terintegrasi di seluruh SKPD online dan belum adanya surat keputusan tentang tim pengelola keuangan SIMDA. Dimana keterbatasan atau kendala tersebut dapat membantu optimalisasi pelaksanaan SIMDA Keuangan di area umum Kantor Wali Kota Pematang Siantar.

Penyelenggaraan SIMDA keuangan di BKAD Kota Pematang Siantar bergantung pada beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya, yaitu komunikasi positif yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keuangan SIMDA, sikap pelaksana dalam menerima/menyetujui pelaksanaannya, pembiayaan SIMDA, SIMDA dan dukungan kepala kantor/pimpinan serta struktur birokrasi berperan dalam pengawasan berjalannya sistem aplikasi komputerisasi SIMDA Finance, namun masih ada beberapa unsur pendukung yang belum mendapat perhatian serius, yaitu sumber daya manusia. Kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA Finance meliputi: Dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan

## DAFTAR REFERENSI

- Ardana, Hendro. (2016). *Sistem Informasi Akutansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azhar, Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Darmawan, Deni. (2012). *Pendidikan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Rosda
- Edwards, G.C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional, Quartely Press.
- Hertanto, Yogi. (2017). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan*. Dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Malang. Vol.1 No.2 <https://pemkomedan.go.id/>
- Minarni, dkk. (2011). *Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Politeknik Kesehatan Padang*. Dalam *Jurnal Teknologi Informasi & Pendidikan ITP*, 3(1).
- Nadya C. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado*. Dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.2 No.5.
- Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Satgas Pengembangan SIMDA. (2008). *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darea, Devita Wulandari. (2015). *Evaluasi penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* Vol.3. No.2 ISSN:2303-1174 Hal. 144-122
- Grizzle dan Pettinjohn. (2002). *Teori Inplementasi Kebijakan*, ([http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9950/SKRIPSI%20BA RU\\_.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9950/SKRIPSI%20BA RU_.pdf)).
- Halim, A., & Kusufi, S., 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mitami, Dian. (2013). *Analisis Penerapan Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep*. E-Journal Unhas. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9950>.
- Pangestika, Aulia Lorie. (2016). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Politeknik Harapan Bersama. Tegal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riyanto., & Agus, P., (2015). *Akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Rochaety, E., Ridwan, F. & Setyowati, T., (2013). *Sistem informasi manajemen*. Edisi Dua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Satgas Pengembangan SIMDA (2008). *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA. Bandung.
- Taswan, (2015). *Akuntansi Perbankan*. Cetakan Keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.